

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Studi empiris yang telah dilakukan peneliti terdahulu mengenai standart akuntansi pada UMKM serta faktor penghambatnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti, Tahun dan Judul	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Widyana I Putu Oka(2017) Penyusunan laporan keuangan berdasarkan standart akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik(sak etap) pada usaha mikro,kecil,menengah(studi kasus pada UD Andhika Mandiri)	Kualitatif deskriptif	SAK ETAP pada usaha UD Adhikari Mandiri antara lain, Ketidakmampuan sumber daya manusia yaitu, bagian keuangan beralasan bahwa mereka tidak paham akan ilmu akuntansi dasar bahkan sulit bagi mereka untuk belajar ilmu akuntansi tersebut. Mereka cenderung tidak paham akan tata cara melakukan pencatatan yang sesuai dengan SAK ETAP.
2	Widyastuti Pristiana(2017) Pencatatan Laporan Keuangan Berbasis Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) Pada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Bidang Jasa	Kualitatif deskriptif	Kendala yang dialami oleh pemilik usaha dalam menerapkan pencatatan keuangan berbasis SAK-ETAP dilatarbelakangi antara lain kurangnya pengetahuan mencatat laporan keuangan secara lengkap, kurangnya pengetahuan pemilik usaha mengenai tujuan dan manfaat pencatatan keuangan berbasis SAK-ETAP dan terbatasnya pengetahuan pemilik usaha mengenai tujuan laporan keuangan yang dibuat hanya sebagai informasi pribadi pengelola Dis-Co, minimnya pemerintah terutama pembina UMKM untuk mensosialisasikan dan melatih para penggiat UMKM terkait hal tersebut.
3	Ramdani Muhammad	Kualitatif	Pencatatan yang dilakukan

Lanjutan

Dilanjutkan

	Reza(2018) Implementasi Sak-Etap pada Umkm Warkop Di Kota Makassar	deskriptif	Pengelola UMKM Warkop tersebut tidak sesuai dengan siklus akuntansi dapat dikatakan hanya melakukan pencatatan sebatas kas masuk dan kas keluar. Pengelola UMKM Warkop tidak menerapkan SAK-ETAP dalam menyusun laporan keuangan, karena Pengelola UMKM Warkop kurang memahami SAK-ETAP. Pengelola menganggap pencatatan yang dilakukan sudah jelas dan sesuai dengan kebutuhan.
4	Kurniawasyah Deddy (2016) Penerapan Pencatatan Akuntansi dan Penyusunan Laporan Keuangan Berdasarkan Sak-Etap Pada Umkm Desa Gembongsari Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi	Kualitatif deskriptif	Persepsi pengusaha UMKM di Desa Gembongsari mengenai pentingnya keberadaan laporan keuangan, antara lain: pengusaha UMKM merasa tidak membutuhkan informasi akuntansi dan menyatakan bahwa sulit untuk melakukan pencatatan akuntansi dengan segala keterbatasan yang dimiliki; kebutuhan akan penyelenggaraan catatan akuntansi dianggap hanya membuang waktu dan biaya.
5	Ayu Ningtyas Gilma Dewi, S.Pd, M.Si (2017) Penyusunan Laporan Keuangan UMKM Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil dan Menengah (SAK-EMKM) (Study Kasus Di UMKM Bintang Malam Pekalongan)	Kualitatif Deskriptif	Berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan dalam bab sebelumnya maka dapat diperoleh kesimpulan bahwa laporan keuangan UMKM Bintang Malam yang disusun peneliti berdasarkan SAK EMKM
6	Shonhadji Nanang, Aghe A.,Laely Djuwito (2017) Penerapan Penyusunan Laporan Keuangan Pada Usaha Kecil Menengah Berdasarkan Sak Emkm Di Surabaya	Kualitatif deskriptif	Usaha jasa laundry mitra tidak melakukan pencatatan berdasarkan sistem akuntansi yang berlaku pada SAK EMKM. Usaha jasa laundry mitra memiliki pencatatan keuangan sebatas pada pemasukan dan pengeluaran laundry, sehingga penerapan akuntansi berdasarkan pencatatan transaksi dan laporan keuangan yang berdasarkan SAK EMKM pada usaha jasa sangat lemah.
7.	Anisah Nur,Pujiati Lilik	Kualitatif	Menyatakan bahwa ketidaksiapan

Lanjutan

	<p>(2018)</p> <p>Kesiapan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Dalam Penerepan Standart Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah Untuk Menunjang Kinerja</p>	deskriptif	<p>pelaku UMKM dalam menerapkan laporan keuangan yang sesuai dengan SAK EMKM. Kendala yang dialami oleh pelaku UMKM dalam pencatatan akuntansi dan pembuatan laporan keuangan adalah tidak memiliki sumberdaya khusus dilakukan oleh pemilik yang tidak memahami tentang akuntansi dan laporan keuangan. Sebagian diantara pelaku UMKM juga menganggap bahwa laporan keuangan tidak terlalu dibutuhkan karena data yang dikelola adalah data pribadi yang tidak perlu dipertanggungjawabkan pada pihak lain. Beberapa pelaku UMKM mengakui sebenarnya pencatatan akuntansi maupun laporan keuangan bermanfaat untuk menunjang kinerja usahanya, namun karena kendala yang ada, mereka belum siap menerapkan SAK EMKM pada usaha mereka, meskipun beberapa diantaranya pernah memperoleh pelatihan akuntansi.</p>
8.	<p>(Suridianto, et al., 2017)</p> <p>Penyusunan Laporan Keuangan Berdasarkan Sak Etap Pada Kelompok Wanita Tani “Sari Tunjung” Banjar Dinas Witajati, Desa Selat, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng</p>	Kualitatif deskriptif	<p>(1) Pencatatan akuntansi yang dilakukan oleh kelompok wanita tani “Sari Tunjung” masih sederhana dan secara manual. Kelompok ini hanya membuat laporan operasional dan laporan neraca berdasarkan catatan jumlah pinjaman anggota, buku pendapatan dan pengeluaran kas.</p> <p>(2) Penyusunan Laporan keuangan kelompok wanita tani “Sari Tunjung” yang dilakukan peneliti telah sesuai dengan SAK ETAP. Implikasi penerapan SAK ETAP terhadap laporan keuangan kelompok wanita tani “Sari Tunjung” tahun 2016 menyebabkan terjadinya perubahan akun dan nominal pada laporan laba rugi dan laporan neraca.</p> <p>(3) kendala yang dialami oleh kelompok wanita tani “Sari Tunjung” dalam menyusun laporan keuangan berdasarkan SAK ETAP yaitu: tidak mengetahui tentang pencatatan</p>

Dilanjutkan

			keuangan berbasis SAK ETAP, faktor kekurangan SDM (Sumber Daya Manusia), dan faktor ketidakpahaman manfaat dan ketidaktahuan tata cara melaksanakan pencatatan dan jumlah transaksi yang kecil.
--	--	--	---

Secara garis besar semua penelitian memiliki kesamaan (Suridianto, et al., 2017) satu sama lain dengan berbentuk pembuktian SAK-ETAP maupun UMKM yang digunakan di UMKM. Banyak yang meneliti yang berujung dengan pemakaian standart yang belum diterapkan dengan adanya resiko dan hambatan yang ada dengan kurangnya sumber daya yang memadai. Perbedaan peneliti Widyana I Putu Oka(2017) dan Widyastuti Pristiana(2017) yang menunjukkan keterbatasan sumber daya manusia yang memadai dengan penelitian ini dapat dilihat dibawah ini :

1. Dalam hal ini skripsi yang akan dilakukan ingin mengungkapkan bagaimana dan apa yang dirasakan oleh UMKM yang sebelum dan sesudah melakukan pencatatan laporan keuangan berbasis SAK EMKM.
2. Apakah penerapan SAK EMKM itu malah membuat mudah atau membuat sulit pencatatan laporan keuangan serta sedikit menggali perbandingan apa yang didapat dari pencatatan sesudah dan sebelum dilakukan pencatatan tersebut.
3. Namun dalam objek yang saya angkat dari UD FURNITURE JAYA yang bergerak pada bidang furnitur.
4. Periode pengamatan adalah periode tahun 2019

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Standart Akuntansi Keuangan

2.2.1.1 Definis Akuntansi

(Suwadjono, 2013) Akuntansi adalah seperangkat pengetahuan dan fungsi yang berkepentingan dengan masalah pengadaan, pencatatan, pengklasifikasian, pemrosesan, peringkasan, penganalisisan, pengimpresntasian, dan penyajian secara sistematis informasi yang dapat dipercaya dan berdaya guna tentang transaksi dan kejadian yang bersifat keuangan yang diperlukan untuk dasar penyusunan laporan yang harus disampaikan untuk memenuhi pertanggung jawaban pengurusan keuangan dan lainnya

(Soemarso, 2017) Tujuan utama akuntansi adalah menyajikan informasi ekonomi dari suatu kesatuan ekonomi kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Informasi yang dihasilkan oleh akuntansi akan berguna bagi pihak-pihak di dsalam usaha tersebut. Untuk menghasilkan infrmasi ekonomi, diperlukan metode pencatatan, penggolongan, analisis, dan penendalian transaksi serta kegiatan keuangan. Kegiatan akuntansi meliputi ;

1. Pengidentifikasian dan pengukuran data yang relevan untuk suatu pengambilan keputusan.
2. Pemrosesan data yang bersangkutan kemudian pelaporan informasi yang dihasilkan.
3. Pengomunikasian informasi kepada pihak laporan.

Kegiatan-kegiatan tadi perlu dirangkaikan alam suatu sistem yang disebut sistem akuntansi.

2.2.2 Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik

2.2.2.1 Definisi SAK ETAP

SAK ETAP adalah Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik, artinya SAK ETAP diperuntukkan bagi entitas yang laporan keuangannya tidak akuntabel untuk publik secara luas. Biasanya SAK ETAP diterapkan oleh usaha kecil dan menengah, karena tidak memperjualbelikan sahamnya di pasar modal. SAK ETAP diterbitkan tahun 2009 berlaku efektif 1 Januari 2011 dan dapat diterapkan lebih awal

yaitu 1 Januari 2010. SAK ETAP ini dimaksudkan agar semua unit usaha menyusun laporan keuangan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Sesuai dengan ruang lingkup SAK ETAP maka Standar ini dimaksudkan untuk digunakan oleh entitas tanpa akuntabilitas publik. Entitas tanpa akuntabilitas publik yang dimaksud adalah entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan; dan tidak menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum (general purpose financial statement) bagi pengguna eksternal. Contoh pengguna eksternal adalah pemilik yang tidak terlibat langsung dalam pengelolaan usaha, kreditur, dan lembaga pemeringkat kredit.

Suatu entitas memiliki akuntabilitas publik yang signifikan, jika entitas tersebut telah mengajukan pernyataan pendaftaran, atau dalam proses pengajuan pernyataan pendaftaran pada otoritas pasar modal atau regulator lain untuk tujuan penerbitan efek di pasar modal atau entitas menguasai aset dalam kapasitas sebagai fidusia untuk sekelompok besar masyarakat, seperti bank, entitas asuransi, pialang dan atau pedagang efek, dana pensiun, reksa dana dan bank investasi (Sumber : Standar Akuntansi Keuangan-Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik).

2.2.2.2 Pelaporan Keuangan ETAP

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia dalam SAK ETAP (2009), laporan keuangan adalah bagian dari proses pelaporan keuangan, dan laporan keuangan yang lengkap meliputi : neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

1. Neraca

Neraca merupakan bagian dari laporan keuangan suatu perusahaan yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menunjukkan posisi keuangan perusahaan pada akhir periode tersebut. Neraca minimal mencakup pos – pos berikut ; kas dan setara kas, piutang usaha dan piutang lainnya, persediaan, properti investasi, aset tetap, aset tidak berwujud, utang usaha dan utang lainnya, aset dan kewajiban pajak, kewajiban diestimasi, ekuitas.

2. Laporan laba rugi

Laporan laba rugi menyajikan hubungan antara penghasilan dan beban dari entitas. Laba sering digunakan sebagai ukuran kinerja atau sebagai dasar untuk pengukuran lain, seperti tingkat pengembalian investasi atau laba per saham. Unsur – unsur laporan keuangan yang secara langsung terkait dengan pengukuran laba adalah penghasilan dan beban. Laporan laba rugi minimal mencakup pos – pos sebagai berikut : pendapatan, beban keuangan, bagian laba rugi atau rugi dai investasi yang menggunakan metode ekuitas, beban pajak, laba atau rugi neto.

3. Laporan perubahan ekuitas

Dalam laporan ini menunjukkan :

Seluruh perubahan dalam ekuitas untuk suatu periode, termasuk di dalamnya pos pendapatan dan beban yang diakui secara langsung dalam ekuitas untuk periode tersebut, pengaruh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan yang diakui dalam periode tersebut. Perubahan ekuitas selain perubahan yang timbul dari transaksi dengan pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik termasuk jumlah investasi, penghitungan deviden dan distribusi lain ke pemilik ekuitas selama suatu periode.

4. Laporan arus kas

Laporan arus kas menyajikan informasi perubahan historis atas kas dan setara kas entitas, yang menunjukkan secara terpisah perubahan yang terjadi selama satu periode dan aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.

5. Catatan atas laporan keuangan

Catatan atas laporan keuangan berisi informasi sebagai tambahan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan memberikan penjelasan naratif atau rincian jumlah yang disajikan dalam laporan keuangan dan informasi pos – pos yang tidak memenuhi kriteria pengakuan dalam laporan keuangan.

2.2.3 Standart Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil dan Menengah

Ikatan Akuntansi Indonesia (2014:3) Laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan entitas. Tujuan pelaporan keuangan adalah untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas bermanfaat bagi sebagian besar penggunaan laporan keuangan dalam membuat keputusan ekonomik.

SAK EMKM merupakan standart yang digunakan oleh entitas mikro, kecil, dan menengah. Entitas mikro, kecil, dan menengah adalah entitas tanpa akuntabilitas publik yang signifikan, sebagaimana didefinisikan dalam Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP), yang memenuhi definisi dan kriteria usaha mikro, kecil, dan menengah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, setidaknya selama dua tahun berturut-turut.

Ikatan Akuntan Indonesia dalam SAK EMKM (2016:8) menjelaskan bahwa laporan keuangan EMKM minimum terdiri dari :

1. Laporan Posisi Keuangan

Laporan posisi keuangan memuat 3 mengatur informasi yang disajikan di dalam laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan menyajikan informasi tentang aset, liabilitas, dan ekuitas entitas pada akhir periode pelaporan. Unsur-unsur tersebut diartikan sebagaimana berikut ini :

- a. Aset adalah sumber daya yang dikuasai oleh entitas sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan yang dari mana manfaat ekonomik dimasa depan diharapkan akan diperoleh dimasa depan.

- b. Liabilitas adalah kewajiban kini entitas yang timbul dari peristiwa masa lalu, yang penyelesaiannya mengakibatkan arus keluar dari sumber daya entitas yang mengandung manfaat ekonomik.
- c. Ekuitas adalah hak residual atas aset entitas setelah dikurangi seluruh liabilitas. Laporan posisi keuangan entitas mencakup pos-pos berikut ini: kas dan setara kas, piutang, persediaan, aset tetap, utang usaha, utang bank, dan ekuitas. Pos-pos yang disajikan dalam SAK EMKM tidak harus diurutkan secara baku. Namun, entitas dapat menyajikan pos-pos aset sesuai urutan likuiditas dan urutan jatuh tempo untuk pos-pos liabilitas.

2. Laporan Laba Rugi

Laporan laba rugi menyajikan informasi tentang pendapatan dan beban dari suatu entitas. Tujuan penyajian laporan laba rugi adalah untuk mengetahui kinerja keuangan entitas dalam suatu periode. Laporan laba rugi entitas mencakup pos-pos sebagai berikut : beban keuangan, pendapatan, beban pajak.

3. Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan berisi hal-hal sebagai berikut : suatu pernyataan bahwa laporan keuangan telah disusun sesuai dengan SAK EMKM, ikhtiar kebijakan akuntansi, serta informasi tambahan dan rincian pos tertentu yang menjelaskan transaksi penting dan material. Informasi tersebut diharapkan dapat bermanfaat bagi pengguna untuk memahami laporan keuangan. Jenis informasi tambahan dan rincian yang disajikan bergantung pada jenis kegiatan usaha yang dilakukan oleh entitas.

Dasar pengukuran unsur laporan keuangan dalam SAK EMKM adalah biaya historis dan menggunakan dasar akrual. Biaya historis suatu aset adalah sebesar jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan untuk memperoleh aset pada saat perolehan. Biaya historis suatu liabilitas adalah sebesar jumlah kas atau setara kas yang diterima atau jumlah kas yang

akan diperkirakan akan dibayarkan untuk memenuhi liabilitas dalam pelaksanaan usaha normal. Dalam dasar akrual pos-pos diakui sebagaimana definisi dan kriteria dalam pengakuan untuk masing-masing pos.

Pengakuan dalam laporan keuangan SAK EMKM (2016:6) menurut Ikatan Akuntan Indonesia diatur sebagaimana berikut :

1. Aset

Diakui dalam laporan posisi keuangan ketika manfaat ekonominya di masa depan dapat dipastikan akan mengalir ke dalam entitas dan aset tersebut memiliki biaya yang dapat diukur dengan andal. Aset tidak diakui dalam laporan posisi keuangan jika manfaat ekonominya dipandang tidak mungkin mengalir ke dalam entitas walaupun pengeluaran telah terjadi. Sebagai alternatif, transaksi tersebut menimbulkan pengakuan beban dalam laporan laba rugi.

2. Liabilitas

Diakui dalam laporan posisi keuangan jika pengeluaran sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi dipastikan akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban entitas dan jumlah yang harus diselesaikan dapat diukur secara andal.

3. Penghasilan

Diakui dalam laporan laba rugi jika kenaikan manfaat ekonomi di masa depan yang berkaitan dengan kenaikan aset atau penurunan liabilitas telah terjadi dan dapat diukur secara andal.

4. Beban

Diakui dalam laporan laba rugi jika penurunan manfaat ekonomi di masa depan yang berkaitan dengan penurunan aset atau kenaikan liabilitas telah terjadi dan dapat diukur secara andal.

Seusai dengan persyaratan SAK EMKM (2016:7) penyajian laporan keuangan harus disusun secara wajar. Penyajian wajar berarti penyajian yang jujur atas segala transaksi yang tersaji dalam laporan keuangan. penyajian wajar tersebut untuk mencapai tujuan :

1. Relevan : Informasi dapat digunakan oleh pengguna untuk proses pengambilan keputusan.
2. Representasi tepat : Informasi disajikan secara tepat atau secara apa yang seharusnya disajikan dan bebas dari kesalahan material dan biasa.
3. Keterbandinga : Informasi dalam laporan keuangan entitas dapat dibandingkan antar periode untuk mengidentifikasi kecenderungan posisi dan kinerja keuangan. Informasi dalam laporan keuangan entitas juga dapat dibandingkan antar entitas untuk mengevaluasi posisi dan kinerja keuangan.
4. Keterpahaman : Informasi yang disajikan dapat dengan mudah dipahami oleh pengguna. Pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai serta kemauan untuk mempelajari informasi tersebut dengan ketekunan yang wajar.

2.2.4 Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

1. Ruang Lingkup UMKM

SAK EMKM dimaksudkan untuk digunakan oleh entitas mikro, kecil, dan menengah. Entitas mikro, kecil, dan menengah adalah entitas tanpa akuntabilitas publik yang signifikan, sebagaimana didefinisikan dalam Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP), yang memenuhi definisi dan kriteria usaha mikro, kecil, dan menengah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, setidaknya selama dua tahun berturut-turut.

2. Definisi UMKM

Definisi UMKM berdasarkan dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

3. Kriteria UMKM

Tabel 2.2 Kriteria

Keterangan	Mikro	Kecil	Menengah
Jumlah kekayaan bersih (tidak termasuk tanah dan bangunan)	Maksimal Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00 s/d Rp500.000.000,00	Rp500.000.000,00 s/d Rp10.000.000.000,00
Hasil penjualan tahunan	Rp 300.000.000,00	Rp300.000.000,00 s/d Rp2.500.000.000,00	Rp2.500.000.000,00 s/d Rp50.000.000.000,00

Sumber: (IAI, 2016)

4. Peranan UMKM

Berikut ini merupakan beberapa peran penting UMKM menurut Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia dan Bank Indonesia (2015) :

1. UMKM merupakan pemain penting di berbagai sektor dalam upaya perluasan bidang ekonomi dan pemberdayaan masyarakat.
2. UMKM membantu negara sebagai penyedia lapangan kerja, pencipta pasar baru, sumber inovasi, serta terlibat dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat.
3. UMKM sebagai penyumbang pendapatan nasional dan devisa negara sehingga dapat meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi Indonesia.

5. Kendala Bisnis UMKM

Berikut ini merupakan kendala yang sering terjadi pada UMKM menurut Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia dan Bank Indonesia (2015) :

1. Modal

Terdapat sekitar 60-70% UMKM belum mendapat akses atau pembiayaan perbankan. Diantara penyebabnya, hambatan geografis. Belum banyak perbankan mampu menjangkau hingga ke daerah pelosok dan terpencil. Kemudian kendala administratif, manajemen bisnis UMKM masih dikelola secara manual dan tradisional, terutama manajemen keuangan. Pengelola belum dapat memisahkan antara uang untuk operasional rumah tangga dan usaha.

2. Sumber Daya Manusia

Kurangnya pengetahuan mengenai teknologi produksi terbaru dan cara menjalankan quality control terhadap produk serta pemasaran produk masih menggunakan cara sederhana yaitu dengan informasi dari mulut ke mulut dan masih sulit mencari link untuk menggunakan cara pengembangan melalui media sosial.

3. Hukum

Pada umumnya pelaku usaha UMKM masih berbadan hukum perorangan.

4. Akuntabilitas

Belum mempunyai sistem administrasi keuangan dan manajemen yang baik.

5. Iklim Usaha Belum Kondusif

Koordinasi antar stakeholder UMKM masih belum padu. Lembaga pemerintah, institusi pendidikan, lembaga keuangan, dan asosiasi usaha lebih sering berjalan masing-masing.

6. Infrastruktur

Terbatasnya sarana dan prasarana usaha terutama berhubungan dengan alat-alat teknologi mayoritas kebanyakan UMKM menggunakan teknologi yang masih sederhana.

7. Akses

Keterbatasan akses terhadap bahan baku, sehingga seringkali UMKM mendapatkan bahan baku yang berkualitas rendah.

2.2.5 Peranan Akuntansi Bagi UMKM

Warsono(2010:8) berpendapat bahwa jika suatu UMKM menerapkan akuntansi dengan tepat semestinya maka UMKM dapat memperoleh beberapa informasi keuangan sebagai berikut :

1. Informasi kinerja perusahaan

Informasi ini dapat dilihat pada laporan laba/rugi. Laporan tersebut mencerminkan bagaimana kemampuan UMKM dalam menghasilkan laba. Selain itu, laporan tersebut dapat digunakan untuk menganalisis penyebab penurunan laba/rugi yang terjadi.

2. Informasi perhitungan pajak

Berdasarkan pada laporan laba/rugi yang tersedia maka UMKM dapat menghitung secara akurat besaran pajak yang harus dibayarkan untuk periode tertentu.

3. Informasi posisi dan perusahaan

Informasi ini tercermin pada laporan posisi keuangan yang menyajikan penggunaan dan pada kelompok aset serta sumber perolehan dana yang berasal dari utang dan ekuitas.

4. Informasi perubahan modal pemilik

Berdasarkan laporan perubahan ekuitas yang tersedia, UMKM dapat mengetahui perubahan yang terjadi pada sumber pendanaan, khususnya yang berasal dari ekuitas sehingga bermanfaat untuk mengetahui perkembangan modal pemilik di perusahaan.

5. Informasi pemasukan dan pengeluaran kas

Informasi ini dapat dilihat pada laporan arus kas yang mencerminkan pemerolehan dan penggunaan aset yang berupa kas.

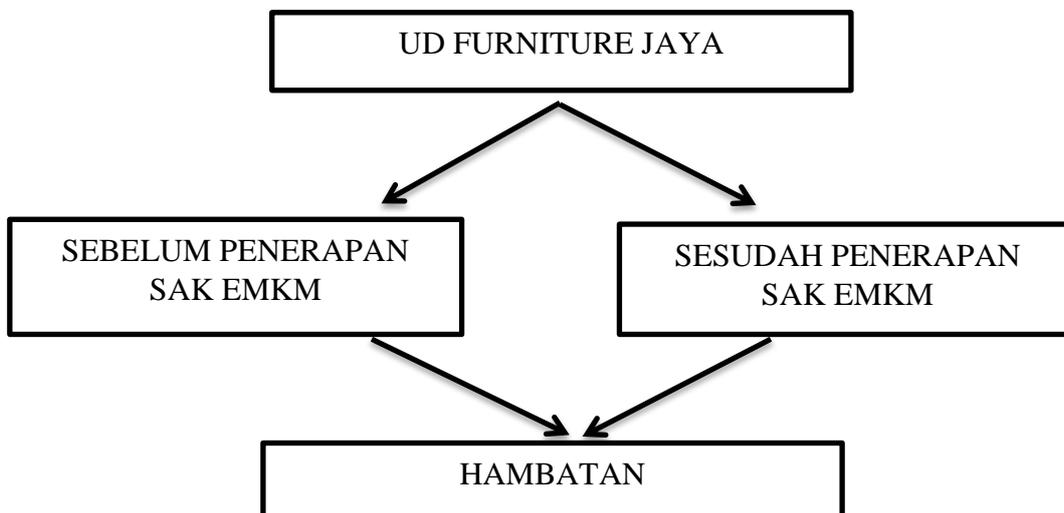
6. Informasi perencanaan kegiatan

Informasi ini didapat dari laporan anggaran yang menggambarkan kegiatan yang direncanakan beserta dana yang dibutuhkan dalam periode tertentu

7. Informasi besaran biaya

Akuntansi menghasilkan informasi mengenai beragam biaya yang dikeluarkan serta informasi lain yang berpengaruh pada pengeluaran biaya tersebut.

2.3 Kerangka Konseptual





ANALISIS IMPLEMENTASI SAK
EMKM PADA UD FURNITURE JAYA

Gambar 2.3 Kerangka Konseptual

Dari gambar kerangka konseptual di atas dapat dijelaskan bahwa penelitian ini dengan memilih UMKM yang akan dijelaskan sebagai objek penelitian. Setelah objek ditentukan yang dalam penelitian ini adalah umkm UD Furniture Jaya di Desa Gading Dusun Kurban RT 002 RW 007 Kecamatan Winongan, Kabupaten Pasuruan maka dilakukan penelitian lapangan. Penulis mencari tahu tentang yang dirasa sebelum dan sesudah penerapan akuntansi dan laporan keuangan yang dilakukan oleh umkm UD Furniture Jaya serta hambatan penerapan SAK EMKM.

Apabila UMKM UD Furniture Jaya telah membuat laporan keuangan maka laporan tersebut akan dianalisis untuk mengetahui apakah telah sesuai dengan SAK EMKM atau belum sesuai. Dalam penelitian ini juga akan melihat hambatan apa yang terjadi di proses pembuatan laporan keuangan. Setelah itu baru dilakukan analisis maka dapat disimpulkan bagaimana implementasi UMKM UD Furniture Jaya dalam penerapan SAK EMKM pada sektor furniture.

